

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengujian dan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ukuran pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap audit delay, organisasi-organisasi besar lebih cenderung memiliki aset yang lebih besar dan itu menyebabkan transaksi yang lebih banyak sehingga hal tersebut menyebabkan semakin lambat proses pembuatan laporan keuangan dan proses auditnya. Apabila diinterpretasikan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi lamanya waktu penyelesaian audit pada pemerintah daerah, terdapat faktor yang mempengaruhi lamanya waktu penyelesaian audit salah satunya yaitu ukuran pemerintah daerah. Sehingga dalam hal ini menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap audit *delay*.
2. Nilai APBD tidak berpengaruh terhadap audit delay, Pemerintah Daerah yang memiliki APBD besar memiliki transaksi keuangan lebih banyak dan nilainya lebih besar dibandingkan dengan daerah yang memiliki APBD lebih kecil. Besarnya nilai APBD yang di miliki oleh pemerintahan maka pemerintah mampu memiliki teknologi, fasilitas, serta sumber daya yang lebih baik sehingga mampu menyusun laporan keuangan lebih cepat sehingga BPK dapat lebih cepat dalam menyelesaikan proses auditnya. Dengan kata lain semakin besar total pendapatan yang dimiliki oleh pemerintahan akan mengurangi tingkat audit delay. Sehingga dalam hal ini menyatakan bahwa nilai APBD tidak berpengaruh terhadap audit *delay*.
3. Leverage berpengaruh negatif terhadap audit delay, semakin tinggi tingkat leverage menandakan kinerja pemerintah semakin buruk, karena pemerintah dianggap tidak mampu mengelola pendapatan untuk belanja daerahnya dengan baik. Sedangkan audit delay dalam penelitian ini tidak

mengukur secara kompleks pengelolaan pendapatan pemerintah melainkan tenggang waktu sejak tanggal laporan keuangan pemerintah daerah diterima oleh BPK sampai kepada tanggal penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah kepada DPRD, sehingga dalam hal ini menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap audit *delay*.

4. Opini Audit tidak berpengaruh terhadap audit *delay*, ketika suatu pemerintahan mendapatkan opini WTP maka pemerintahan daerah tersebut akan berusaha untuk mempertahankan kinerjanya dengan tetap tepat waktu dalam pelaporan keuangan. Sehingga dalam hal ini menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap audit *delay*.
5. Ukuran pemerintahan, nilai APBD, *leverage*, dan opini audit secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap audit *delay*. Besarnya ukuran pemerintahan, nilai APBD akan sejalan lurus dengan peningkatan sumber daya dan fasilitas dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut yang lebih memungkinkan untuk pemerintahan tersebut lebih mampu menyediakan laporan keuangan yang handal, dan pada *leverage* dimana aset yang dibiayai dari utang pemerintah tidak akan menghambat penyusunan dan pelaporan laporan keuangan pemerintah tersebut. Serta opini audit suatu pemerintahan dilihat dari opini yang didapat oleh pemerintahan tersebut, apabila pemerintah daerah telah mendapatkan opini WTP maka pemerintah daerah tersebut akan berusaha mempertahankan kinerjanya dengan selalu tetap waktu dalam membuat laporan keuangannya. Audit *delay* dalam penelitian ini mengukur tenggang waktu sejak tanggal laporan keuangan pemerintah daerah diterima oleh BPK sampai kepada tanggal penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah kepada DPRD.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, beberapa saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dan para auditor diharapkan mampu menyusun dan melaporkan laporan keuangan daerah dengan lebih tepat waktu guna mencegah Audit Delay. Ukuran pemerintahan yang besar seharusnya mampu menunjang pemerintah dalam penyusunan laporan keuangannya, yang mana teknologi, sumber daya dan fasilitas yang ada mampu digunakan secara optimal terutama dalam penyusunan dan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah..
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan dapat menggunakan variabel independen lain yang diduga memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan mengganti atau menambah objek penelitian guna untuk meningkatkan keakuratan kualitas hasil penelitian.